



DHARMA SMṚTI

JURNAL ILMU AGAMA & KEBUDAYAAN

Vol. VI Nomor 12 Oktober 2008

ISSN : 1693 - 0304

- I Wayan Sukarma **337** Pendidikan Sepanjang Zaman :
Perspektif Sankhya -Yoga
- I Wayan Suka Yasa **355** Itihasa : Pesan Moral untuk
Pemimpin
- Ni Putu Suwardani **370** Gaya Kepemimpinan Transaksional
dan Transformasional : Upaya Meningkatkan
Komitmen terhadap Organisasi
- I Wayan Budi Utama **383** Modal Budaya dan Modal Sosial
dalam Kepemimpinan: Telaah Isi
Kakawin Niti Sastra
- I Gde Semadi Astra **400** Jabatan Pemimpin: Barang Rebutan
yang Penuh Syarat dan Janji
- I Putu Gelgel **413** Kontribusi dan Legalitas Akademisi di
atas Panggung Politik : Perspektif Etika
Akademik dan Hak-hak Asasi Manusia
- Ida Bagus Dharmika **425** Politik Sentralisasi Kehutanan dalam
Keragaman Kearifan Lokal
- Ida Bagus Gde Yudha Triguna **432** Strategi Adaptasi Budaya
- Ida Ayu Gde Yadnyawati **444** Pola Asuh Orang Tua dalam
Membantu Anak Mengembangkan
Disiplin Diri
- Akmal Tanjung **452** The Root of Radicalism in Islam
- Dewa Ketut Putra **458** Bali Berjuang : Upaya Rekonstruksi
Sejarah (Bali)

DHARMA SMṚTI	Vol. VI	No. 12	Hal. 337-460	Denpasar Oktober 2008	ISSN 1693-0304
--------------	---------	--------	--------------	--------------------------	-------------------

PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA & KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA



DHARMA SMRTI

JURNAL ILMU AGAMA & KEBUDAYAAN

Vol. VI Nomor 12 Oktober 2008

ISSN : 1693 - 0304

Pemimpin Redaksi

Prof. Dr. Ida Bagus Gde Yudha Triguna, M.S.

Editor Ahli

- Prof. Dr. I Gusti Ngurah Gorda, M.S., M.M. (Unhi, Denpasar)
Prof. Dr. I Gusti Ngurah Nala, M.P.H. (Unud, Denpasar)
Prof. Dr. Ida Wayan Oka Jelantik (IPB, Bogor)
Prof. H. Yudistira K. Garna, P. hD. (Unpad, Bandung)
Prof. Dr. I Gusti Ngurah Putu Phalgunadi, M.A., D.Litt (New Delhi)
Prof. Dr. Tjok. Rai Sudharta, M.A. (Unud, Denpasar)
Prof. Dr. Ida Bagus Narendra, M.P.H. (Unud, Denpasar)
Dr. Ida Bagus Gunadha, M.Si. (Unhi, Denpasar)
Prof. Dr. I Gde Parimartha
Dr. Ir. I Wayan Koster, M.M. (Univ. Tarumanegara, Jakarta)
Prof Dr. I Made Putrawan (UNJ, Jakarta)
Prof. Dr. I Nyoman Dantes (IKIP, Singaraja)
Dr. Nasikun (UGM, Yogyakarta)
Prof. Dr. I Wayan Dibia, M.A. (STSI, Denpasar)
Prof. Dr. A.A. Gde Putra Agung, S.U. (Unud, Denpasar)

Ketentuan Redaksi

1. Redaksi berhak menyunting naskah namun tanpa menghilangkan substansi isi
2. Tulisan yang dimuat akan memperoleh imbalan yang sewajarnya
3. Artikel ditulis antara 10 - 15 halaman kwarto dan harus dilengkapi dengan abstrak beserta kata-kata kunci yang diketik dalam MS Words 1,5 spasi ! diserahkan dalam disket 3,5 floppy dan print out.

Alamat Redaksi

Program Magister Ilmu Agama & Kebudayaan
Universitas Hindu Indonesia
Jl. Sangalangit, Tembau, Denpasar
Telp/fax. (0361) 462346, 467818
E-mail: magisterunhi@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Bertahan hidup dan menjalani kehidupan secara benar merupakan idola setiap orang, tetapi tidak semua orang sukses dalam praktiknya. Fakta bahwa Anda, wisudawan telah membuktikan diri sukses menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi di UNHI; dan atas kesuksesan itu **Dharmasmrti** mengucapkan, “selamat”, Anda telah menang dalam perjuangan kependidikan, dan semoga kemenangan ini dapat menambah modal Anda dalam perjuangan kehidupan.

Untuk menjadi juara dalam perlombaan hidup, menang dalam pertempuran dan perjuangan hidup, memang menjadikan diri manusia terdidik dalam arti menjadi mulia adalah persyaratan utama. Untuk memenuhi sebagian persyaratan ini, Sukarma menawarkan pendidikan sepanjang zaman dalam perspektif *Sankhya-Yoga*. Memang pendidikan terkait dengan pembentukan moral sehingga Suka Yasa memandang perlu pesan moral untuk pemimpin sebagaimana yang diajarkan dalam *Itihàsa*. Moral memang diperlukan manusia karena ia tidak dapat hidup normal sendirian, karena itu mereka menghimpun dirinya ke dalam satuan-satuan sosial. Ini sebabnya Suwardani merasa perlu mengingatkan betapa pentingnya gaya kepemimpinan transaksional dan transformasional sebagai upaya meningkatkan komitmen terhadap organisasi. Lebih tegasnya, pemimpin organisasi dan pemimpin pada umumnya untuk mencapai tujuan bersama memerlukan beragam modal. Paling tidak Budi Utama dengan mendasarkan diri pada *Kakawin Niti Sastra* mengatakan bahwa dalam kepemimpinan diperlukan modal budaya dan modal sosial. Modal ini memang diperlukan dalam kepemimpinan karena menurut Semadi Astra bahwa jabatan pemimpin adalah barang rebutan yang penuh syarat dan janji. Ini dibuktikan oleh Gelgel dengan signifikannya kontribusi dan legalitas akademisi di atas panggung politik dalam formulasi etika akademik dan hak asasi manusia.

Selain harmoni dengan sesama yang mungkin dicapai melalui pendidikan dan politik, ternyata juga alam menjadi tanggung jawab manusia. Membangun tanggung jawab ini terutama terhadap hutan, Dharmika mengatakan dapat diejawantahkan melalui politik sentralisasi kehutanan dalam keragaman kearifan lokal. Hutan yang menjadi bagian dari lingkungan yang selalu berubah dan juga demikian halnya dengan manusia sehingga Yudha Triguna memandang penting dikuasai pengetahuan tentang strategi adaptasi budaya. Walaupun demikian, Yadnyawati mengatakan, jauh lebih penting menata pola asuh orang tua dalam membantu anak mengembangkan disiplin diri. Disiplin diri menjadi sangat penting di dalam mempersiapkan generasi kedepan agar ia menjadi insan yang terdidik pintar, berdisiplin sekaligus bermoral. Akmal Tanjung berhasil menyoroti betapa kepekaan moral dan sosial sangat diperlukan dalam masyarakat plural. Radikalisme dalam Islam ternyata salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan memahami pluralisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Disiplin inilah yang diperlukan dalam perjuangan hidup sehingga pada akhirnya, seluruh rangkaian wacana dalam terbitan ini ditutup oleh Putra dengan sebuah resensi buku Bali Berjuang dalam tema upaya rekonstruksi sejarah (Bali).

Untuk melanjutkan rangkaian terbitan ini, kepada pembaca diharapkan mengirimkan karya tulis dalam tema Tradisi Bali kepada Redaksi paling lambat pada April 2009.

Om Santih Santih Santih Om



DHARMA SMRTI

JURNAL ILMU AGAMA & KEBUDAYAAN

Vol. VI Nomor 12 Oktober 2008

ISSN : 1693 - 0304

PENDIDIKAN SEPANJANG ZAMAN: PERSPEKTIF SANKHYA-YOGA	337
I Wayan Sukarma	
ITIHÀSA: PESAN MORAL UNTUK PEMIMPIN	355
I Wayan Suka Yasa	
GAYA KEPEMIMPINAN TRANSAKSIONAL DAN TRANSFORMASIONAL: UPAYA MENINGKATKAN KOMITMEN TERHADAP ORGANISASI	370
Ni Putu Suwardani	
MODAL BUDAYA DAN MODAL SOSIAL DALAM KEPEMIMPINAN: TELAAH ISI KAKAWIN NITI SASTRA	383
I Wayan Budi Utama	
JABATAN PEMIMPIN: BARANG REBUTAN YANG PENUH SYARAT DAN JANJI	400
I Gde Semadi Astra	
KONTRIBUSI DAN LEGALITAS AKADEMISI DI ATAS PANGGUNG POLITIK : PERSPEKTIF ETIKA AKADEMIK DAN HAK ASASI MANUSIA	413
I Putu Gelgel	
POLITIK SENTRALISASI KEHUTANAN DALAM KERAGAMAN KEARIFAN LOKAL	425
Ida Bagus Dharmika	
STRATEGI ADAPTASI BUDAYA	432
Ida Bagus Gde Yudha Triguna	
POLA ASUH ORANG TUA DALAM MEMBANTU ANAK MENGEMBANGKAN DISIPLIN DIRI	444
Ida Ayu Gde Yadnyawati	
THE ROOT OF RADICALISM IN ISLAM	452
Akmal Tanjung	
BALI BERJUANG: UPAYA REKONSTRUKSI SEJARAH (BALI)	458
Dewa Ketut Putra	

POLITIK SENTRALISASI KEHUTANAN DALAM KERAGAMAN KEARIFAN LOKAL

Ida Bagus Dharmika

Abstract

The system of centralized politics in managing forestry sources has caused the marginality of forestry management system of which based on *local genius*. A further impact of this problem causes the emergence of social protests from the surrounding communities of the forest with various variants starting from shamanism, hidden transcript, *ngawenan* till robbery of forestry. To avoid the bad forestry management, it is needed a social construction as an approach which states that the usage of forest resources as a factor of production is important for the community who live nearby. It means that forest behaves as the source of the community earnings. However, self control, social control needs to be produced, because there a sign that money has become an orientation of life of the present human beings so that they do not take care again to religion and even it is used as an instrument for commercial purposes.

Key words: forestry centralized politics and local genius.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, hampir semua negara sedang menghadapi masalah pengelolaan lingkungan hutan. Masalah utama adalah, makin menurunnya mutu lingkungan hutan. Masalah lingkungan hutan ini diduga muncul sebagai akibat dari perkembangan kebutuhan manusia yang jauh lebih cepat daripada perkembangan kesadaran manusia tentang keterbatasan hutan. Perkembangan pengetahuan manusia untuk menundukkan hutan jauh lebih cepat berkembang dibandingkan dengan usaha menyelamatkan hutan. Berarti kecenderungan untuk memanfaatkan lingkungan hutan jauh lebih berakar dalam sejarah umat manusia dibandingkan kecenderungan untuk melindungi,

melestarikan dan menyelamatkan lingkungan hutan.

Politik sentralisasi kehutanan dimulai pada tahun 1970-an, ketika diterbitkan UU No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), UU No.5 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan, dan UU No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sentralisasi sistem pengelolaan sumber daya hutan, kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya kebijakan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) sebagai pertanda dimulainya praktek pengelolaan dan pemanfaatan hutan alam tropis secara

mekanis dengan sasaran utama perolehan manfaat ekonomi (Agung Nugraha, 2005:120-121). Tonggak ini merupakan tanda dimulainya ekstraksi kayu yang sering disebut dengan era banjir kap. Secara ekonomis sistem pengelolaan hutan secara sentralistik sangat mendongkrak pendapatan Negara, namun dilain pihak terjadi kerusakan lingkungan hutan yang sangat cepat dan termaginalkan sistem pengelolaan hutan berbasis kerarifan lokal.

Kerusakan hutan di Indonesia bukan hanya telah menurunkan peranannya sebagai penopang ekonomi nasional, tetapi juga telah menurunkan fungsinya sebagai daya dukung kehidupan (*life support system*) (Kartodiharjo, 2005: 1) . Dari data Kementerian Lingkungan Hidup 2005, menunjukkan bahwa dampak lebih jauh dari kerusakan hutan itu adalah munculnya berbagai kemurkaan alam; di Indonesia telah terjadi 236 kali banjir di 136 kabupaten dan 26 propinsi, di samping itu juga terjadi 111 kejadian longsor di 48 kabupaten dan 13 propinsi. Dalam tahun yang sama tercatat 78 kejadian kekeringan yang tersebar di 11 propinsi dan 36 kabupaten. Dalam periode itu juga, 19 propinsi lahan sawahnya terendam banjir, 263.071 hektar sawah terendam dan gagal panen, serta 66.838 hektar sawah puso (Kartodiharjo, 2005:1).

Kemungkinan carut marutnya pengelolaan sumber daya hutan dan ketiadaan institusi lokal yang memadai sebagai resolusi konflik secara historis akibat dari ulah Negara yang *dominatif, hegemonik* dan *otoriter* pada masa lalu (Awang, 2005; Kartodiharjo, 2005). Akibat dari ketiadaan keadilan di sektor kehutanan dalam pengelolaan dan pembagian hasil

muncul berbagai protes-protes sosial dari masyarakat desa hutan. Protes-protes sosial muncul dengan berbagai varian, mulai dari *saminisme, hidden transcript* (perlawanan terselubung seperti menggunakan olok-olok atau pembangkangan) hingga *banditisme* hutan. Para pemrotes ada yang melakukan gerakan diam tidak mau bekerja, pergi ke hutan tetapi di hutan duduk-duduk, *ngrasani* dengan membuat joke-joke, mematikan bibit-bibit pohon yang baru saja ditanam oleh petugas Perhutani hingga melakukan penebangan gelap untuk kepentingan subsistensi atau kelangsungan hidup.

MANAJEMEN KERAGAMAN

Proses penyatuan dan penyeragaman kebudayaan di Indonesia kemudian berimplikasi pada lahirnya pola hubungan sosial dan nilai-nilai baru dalam masyarakat yang menjadi dasar dari lahirnya berbagai persoalan sosial. Kebhinekatunggalikaan telah melahirkan suatu politik budaya yang represif yang melahirkan berbagai bentuk resistensi dan konflik yang laten. Persoalan itu muncul akibat penataan ruang politik yang disusun dalam pengelolaan budaya yang bersifat majemuk (Irwan Abdullah, 2006:71). Dewasa ini, Konflik sosial dalam ruang pengelolaan hutan antara sistem sentralisasi yang dikomandoi oleh pemerintah (Negara) dengan sistem kearifan lokal kerap terjadi.

Dalam tulisan *Darmanto* (2005), dipaparkan proses-proses yang berkaitan dengan pandangan dan cara hidup masyarakat Mentawai di Pulau Siberut terhadap hutan, nilai hutan dan tradisi yang berkaitan dengan tanah dan hutan. Kebijakan pemerintah terhadap hutan

Siberut yang inkonsisten dan kontradiktif telah menggoncang sistem dan pandangan mengenai tata guna lahan. Kebijakan yang inkonsisten itu memaksa masyarakat menegosiasikan hubungan mereka dengan hutan. Negosiasi ini berlangsung amat keras karena melibatkan konflik-konflik horisontal. Akan tetapi masyarakat Mentawai memiliki sejarah yang panjang dengan perubahan-perubahan yang selalu bisa dikaitkan dengan eksploitasi hutan. Masyarakat Siberut pun memahami proses perubahan itu. Akan tetapi mereka menyikapi dengan cara khas dan menghidupkan agenda-agenda mereka sendiri dalam menghadapi agenda-agenda dari luar. Sikap masyarakat yang demikian hampir serupa dengan apa yang disampaikan *Hery Santoso* (2005) tentang petani hutan di Jawa. Jawa yang sebagian besar penguasaan pengelolannya dilakukan oleh Perum Perhutani, telah lama mempunyai persoalan dengan para petani hutan yang ikut menggarap lahan Perhutani. Tanpa ada gerakan yang massif, para petani hutan di Jawa pada umumnya melakukan perlawanan diam-diam dengan berbagai bentuk. Perlawanan itu telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Tidak ubahnya dengan kondisi di Dumoga, Erna S. Adiningsih dkk. Juga mengemukakan masalah kebakaran hutan dan lahan di Sumatera, yang mana akar masalahnya terletak pada masalah hak atas sumber daya hutan. Tanpa penyelesaian masalah hak tersebut, pencegahan kebakaran hutan dan lahan tidak akan dapat dilakukan. Namun, masalah-masalah mendasar seperti itu justru luput dari jangkauan program-program pemerintah. Hal demikian itu sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ridzki

Rinanto Sigit yang membahas pelaksanaan Operasi Hutan Lestari II dan Inpres No.4/2005 terhadap pengendalian illegal logging di Papua. Dikatakannya, tanpa memperhatikan masalah-masalah mendasar terhadap kebutuhan ruang kelola dan kesejahteraan masyarakat Papua, operasi semacam itu hanya akan efektif sesaat saja. (Kartodiharjo, 2005: 10).

Dewasa ini masyarakat Bali sedang giat-giatnya mendiskusikan perhal hutan, danau dan gunung, hal ini berkaitan dengan adanya pembangunan PLTP (proyek Geothermal) di kawasan hutan lindung Batukaru (Bedugul). Pembangunan ini akan menggunakan lahan seluas 53,88 Ha pada kawasan hutan lindung dan 16 Ha pada lahan milik masyarakat. Pembangunan sumur panas bumi sebanyak 43 buah terdiri dari sumur produksi dan sumur injeksi dan berada ditengah-tengah hutan lindung, penurunan keanekaragaman flora dan fauna tak terhindarkan, pengeboran gunungpun dari beberapa titik harus dilakukan. Amdalpun sudah dikerjakan oleh beberapa orang ahli dari berbagai disiplin ilmu yang menghasilkan analisis bahwa kerugian : keuntungan = 19:3, namun para ahli menyebutkan bahwa sebagian kerugian yang dimaksud masih bisa dikelola dan dipantau, mulai dari kegiatan pra konstruksi, konstruksi, operasional, dan tahap pasca operasional.

Salah satu persoalan yang kemudian muncul dan menjadi pro kontra di dalam diskusi-diskusi di masyarakat adalah, apakah hutan dan gunung yang menurut kepercayaan masyarakat Bali (baca: Hindu) merupakan kawasan suci, sakral, dan kawasan hulu/luan bisa dianalisis, dikelola dan dipantau? Akibat lebih jauh terhadap politik sentralisasi pengelolaan hutan

menyebabkan sebagian masyarakat Bali Barat (Jembrana) melakukan agenda-agenda tersendiri yang kadang-kadang sangat keras dan brutal seperti, mencuri kayu, membakar hutan, mengkapling- kapling wilayah hutan, *ngawen/diawen* hutan (menebang kayu, tanahnya kemudian ditanami vanili, kopi, pisang dll). Gerakan ini tidak hanya dilakukan secara perseorangan tetapi bergerombol, bersama-sama dan bahkan menggunakan fasilitas desa adat seperti kulkul (kentongan), pakaian adat dll. Tidak ada langkah yang kongkrit untuk mengamankan hutan "aparat hanya bisa menangkap dan mengamankan kayunya, sementara hutan terus saja dijarah dan dibiarkan begitu saja" Kini daerah pulau Bali yang luasnya sekitar 5.632 Km², memiliki hutan tropis hanya seluas 1.251,49 Km² atau sekitar 22,22% dari total luas daerah Bali (Pemda Bali, 1999: V-22), masih sangat jauh dari ideal yaitu 30% dari luas daerah.

MASALAH RUANG POLITIK BAGI KEARIFAN LOKAL

Sumber-sumber daya hutan telah menjadi sumber ekonomi sejak zaman kerajaan, Belanda, pemerintahan orde lama, pemerintahan orde baru, dan sampai pemerintahan sekarang, karena komoditas kayu masih menjadi andalan sumber devisa pemerintah Indonesia. Ciri pembangunan ekonomi ditandai dengan menguatnya relasi antara kekuasaan politik dan ekonomi. Devisa dari sektor kehutanan menjadi sumber penting untuk mendorong gerak majunya pembangunan bangsa. Kebijakan pemerintah memberikan izin pengusaha kepada pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) menandai babak baru sistem eksploitasi hutan.

Terjadilah dominasi pengetahuan Negara dan tertindasnya pengetahuan masyarakat atas cara-cara pengelolaan hutan di Indonesia. Secara politis sumber daya alam, sudah sangat jelas bahwa domein Negara tersebut sangat kuat dan dalam implikasi pengaturan dan pengurusan sumber daya alam hutan sangat terasa pengaruh cengkeraman Negara tersebut, sehingga sangat terasa bahwa pengelolaan sumber daya alam hutan itu sangat jauh dari alam demokrasi dan keadilan bagi masyarakat. Konflik di berbagai tempat sesungguhnya merupakan bentuk resistensi masyarakat terhadap berbagai tindakan kebijakan pusat (Irwan Abdullah, 2006:71). Dari analisis keberadaan pengelolaan sumber daya hutan yang dikelola secara beragam baik dilihat dari adat, pranata sosial, kepercayaan dari berbagai etnis di Indonesia dengan segala macam dinamikannya dapat dipelajari tiga proses penting yang telah terjadi di Indonesia selama ini.

Pertama, pengingkaran terhadap keberadaan kearifan lokal masyarakat yang beranekaragam di dalam pengelolaan sumber daya hutan. Kearifan lokal tidak mendapat perhitungan dan pengakuan dari Negara, karena Negara lebih mementingkan keseragaman dan sentralisasi di dalam pengelolaan hutan. Hutan dalam perspektif budaya masyarakat desa hutan tidak hanya sebatas sebagai tempat tinggal dan sumber pemenuhan kebutuhan hidup saja. Hutan dalam perspektif antropologi ekologi memiliki fungsi sosial, budaya dan religiusitas. Masyarakat desa hutan memiliki kearifan tradisional yang terbentuk dari interaksi berulang-ulang antara masyarakat dengan sumber daya hutan.

Kebijakan struktural pemerintah pusat yang cenderung eksploitatif terhadap sumber daya hutan berdampak pada kerusakan hutan yang menyengsarakan umat manusia. Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat diabaikan oleh pemerintah dan pelaku usaha. Kerusakan lingkungan sumber daya hutan merupakan bukti tidak diakomodirnya sistem tata nilai kearifan lokal masyarakat desa hutan. Kebijakan *top down* dengan sistem pemerintahan sentralistik berdampak pada pencetusan program pembangunan yang bersifat seragam dengan menafikkan keragaman kearifan lokal masyarakat.

Kedua, politik uniformitas yang mengingkari adanya keanekaragaman budaya yang sangat luas dalam model-model pengelolaan sumber daya hutan. Dalam konteks ini bisa dilihat adanya dominasi pengetahuan Negara dan tertindasnya pengetahuan masyarakat atas cara-cara pengelolaan hutan. Sumber daya hutan yang dikelola oleh masyarakat lokal sebenarnya telah berkembang sangat baik dan hutannya sangat lestari. Sebagai contoh misalnya, hutan yang dikelola oleh desa adat Tenganan Pegriingsingan, Karangasem, Bali; hutan yang dikelola oleh desa adat Sangeh, Bali; hutan yang dikelola oleh desa adat Kedaton (Tabanan, Bali), semua hutan-hutan ini sangat baik keberadaannya, dan bahkan masyarakat sudah mampu mereproduksi kearifan lokal mereka di dalam pengelolaan hutan dan akhirnya bisa mengatasi kapitalisme. Adanya kunjungan wisatawan ke daerah-daerah ini mendongkrak sistem ekonomi masyarakat Tenganan, Sangeh dan Kedaton. Namun, model-model pengelolaan hutan oleh masyarakat adat belum mendapat pengakuan sebagai model

pengelolaan hutan oleh banyak pihak, terutama oleh pemerintah. Dominasi pengetahuan Negara telah dimutlakan dan merefresi pengetahuan masyarakat lokal sehingga mereka tidak berani mengutarakannya arti pengelolaan hutan versi masyarakat.

Untuk menjawab pemutlakan pengetahuan tersebut perlu kiranya meminjam istilah Foucault tentang prinsip geneologis dalam pengetahuan yaitu prinsip yang menekankan bahwa tiap bentuk kebenaran bisa dilacak secara historis pada institusi dan wacana dominan yang melahirkannya. Dalam penelitian Foucault tentang “kegilaan” terungkap bahwa manusia dikatakan gila bukan karena dikonsepsikan sebagai penyakit mental, tetapi lebih merupakan konstruksi sosial yang dibuat oleh institusi (psikologi modern) yang membuat penataan kearah konstruksi tersebut yaitu episteme (Foucault, 2002: 22). Pengetahuan yang mengkonstruksi orang tersebut gila adalah lembaga pendidikan tinggi yang bernama universitas. Pelacakan geneologis pengetahuan ini sama dengan proses dominan pengetahuan Negara tentang hutan dan pengelolaan hutan melalui universitas yang mengembangkan ilmu kehutanan. Konstruksi sosial atas pengetahuan tentang hutan dan pengelolaan hutan di Indonesia juga merupakan *episteme*.

Ketiga, kegagalan pemerintah dalam menjaga keseimbangan dan pemerataan antar kelompok dalam masyarakat di dalam pengelolaan hutan. Ada kelompok masyarakat yang mendapat prioritas dominan di dalam pengelolaan hutan karena kedekatan dengan aparat-aparat penegakan hukum dan pejabat pemerintah.

Namun dilain pihak sekelompok masyarakat merasakan adanya ketidakadilan, terpinggirkan karena mereka tidak memiliki akses dan kedekatan dengan aparat pemerintah. Sebagai contoh, apa yang dikatakan oleh Ketua BPD desa dan *Bendesa adat* Yeh Embang, Jembrana Bali menyatakan bahwa selama ini warga penyanding hutan ingin mendapatkan perlakuan yang sama dengan daerah lainnya agar diberikan *ngawen* hutan sehingga memberikan penghasilan untuk mereka (DenPost, 26 Maret 2007).

Ketika masyarakat meminta bagian secara konkret kepada pemerintah agar mereka diberi hak dan kewajiban pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan, pemerintah yang berkuasan di Indonesia kebingungan untuk memposisikan masyarakat. Sebab sejak awal memang masyarakat secara terstruktur tidak diposisikan untuk mengelola sumber secara sungguh-sungguh.

Ketiga faktor di atas menegaskan bahwa konflik-konflik yang terjadi selama ini bukan semata-mata persoalan perbedaan budaya, tetapi sudah lebih mengakar sebagai kesalahan berbagai pihak dalam pengelolaan perbedaan dan konflik itu sendiri (Irwan Andullah, 2006:76). Kearifan lokal adalah merupakan identitas yang dimiliki oleh masyarakat lokal di dalam pengelolaan hutan, yang menyangkut unsur kepercayaan, tata nilai, norma, hukum dan aturan adat. Ketaatan masyarakat lokal di dalam menjalankan aturan-aturan yang ada menyebabkan hutan yang mereka miliki terjaga kelestariannya. Model pengelolaan hutan yang berbasis kearifan lokal yang beranekaragam harus bisa diterima dan dihargai oleh pemerintah (Negara).

Multikulturalisme merupakan suatu strategi dari integrasi sosial, dimana keanekaragaman budaya benar-benar diakui dan dihormati dapat berfungsi efektif dalam menengarai isu separatisme dan disintegrasi sosial. Hutan bukan milik kita, tetapi milik anak cucu kita.

PENUTUP

Cara-cara masyarakat suatu bangsa memanfaatkan sumber daya alam merupakan cerminan dari dinamika peradaban bangsa dan masyarakat tersebut. Masyarakat dan kebudayaan senantiasa mengalami perubahan mulai dari pemunculan, pemeliharaan dan kesirnaan karena memang perubahan itulah yang abadi.

Mengatasi carut marutnya pengelolaan hutan di Indonesia, dirasakan perlu adanya konstruksi sosial sebagai sebuah pendekatan yang menyatakan bahwa pemanfaatan sumber daya alam hutan sebagai faktor produksi penting bagi masyarakat yang hidup disekitar kawasan hutan, yang berarti bahwa hutan sebagai sumber penghidupan masyarakat. Dalam pandangan konstruksi sosial peran Negara/pemerintah tidak dominan, sebab keputusan-keputusan diserahkan pada mekanisme pasar, misalnya saja komoditas yang disukai masyarakat ditentukan oleh dukungan pasar lokal, nasional dan internasional. Hutan sebagai penghasil barang dan jasa tentu sangat terkait dengan mekanisme pasar, baik pasar untuk jasa-jasa hutan maupun untuk barang-barang yang dihasilkan oleh masyarakat dari dalam kawasan hutan. Namun demikian, pengendalian diri, kontrol sosial perlu direproduksi karena ada gejala bahwa uang telah menjadi orientasi

kehidupan manusia dewasa ini sehingga agama tidak dipedulikan lagi bahkan dijadikan alat untuk kepentingan komersial juga.

Daftar Bacaan

Aditjondro, George Junus. 2003. *Pola Gerakan Lingkungan, Refleksi Untuk Menyelamatkan Lingkungan dari Ekspansi Modal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Abdullah, Irwan. Ph.D. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar Umum*. (Bahan Pelatihan Metodologi Penelitian). Jakarta: Dikti.

Abdullah, Irwan. Prof.Dr. 2006. *Kontruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Allan, Allexander 1970 *The Concept of Adaptation in Biological and Cultural Evolution*, Chicago: Rand Mc Nally College, Publishing Co.

Awang, San Afri. 2003. *Politik Kehutanan Masyarakat*. Yogyakarta: Cen-

ter for Critical Social Studies (CCSS).

Awang, San Afri. 2005. "Sejarah Pemikiran Pengelolaan Hutan Indonesia", dalam *Jurnal Wacana* Edisi 20, tahun VI 2005. Yogyakarta: Insist.

Clifford Geertz. 2003. *Pengetahuan lokal*. Yogyakarta: Rumah Penerbit.

Darmanto. 2005. Krisis Klaim Kepemilikan Hutan di Pulau Siberut. Dalam *Jurnal Wacana* Edisi 20, tahun VI 2005. Yogyakarta: Insist

Lahajir. 2002. *Etnoekologi Perladangan Orang Dayak Tunjung Linggang*. Yogyakarta: Yayasan Galang.

Mansour Fakhri. 2003. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustakapelajar.

Murtijo, Agung Nugraha. 2005. *Antropologi Kehutanan*. Tengerang: Wana Aksara.



Program Magister Ilmu Agama & Kebudayaan
Universitas Hindu Indonesia Jl. Sanggalangit, Tembau, Denpasar
Telp./Fax: (0361) 462346, 462301 E-mail: magisterunhi@yahoo.com